

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Program Dana BOS ini di berikan secara rutin setiap tahun dimulai pada tahun 2005 dalam bentuk anggaran kepada sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya bagian untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Hubungan antara pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia sangat erat dan saling terkait.

Adanya pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah paling tidak dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, sebagai manifestasi tanggung jawab konstitusional, yakni sebagai pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebutuhan dan tuntutan dalam bidang pendidikan semakin meningkat sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk menyalurkan berbagai bantuan, salah satunya adalah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) demi keberlangsungan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lainnya. Dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, dan mengalokasikan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Karena pengalokasian pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004:194).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib berpedoman pada buku Petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS yang di

terbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan program yang di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Petunjuk Teknis BOS 2023 menyebutkan bahwa pengelolaan BOS dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selama ini pemerintah selalu berusaha memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Contoh masalah dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas pendidikan yang di alami oleh Indonesia pada awalnya menjadi suatu tantangan yang di hadapi oleh pemerintah Indonesia. Akibat dari rendahnya kualitas Pendidikan akan menimbulkan kualitas sumber daya manusia yang juga rendah. Hal ini pun bukan serta merta kurangnya peran serta perhatian dari pemerintah tetapi juga kurangnya kesadaran diri dari setiap masyarakat Indonesia. Tanpa Pendidikan yang baik maka suatu negara akan sulit menghasilkan generasi bangsa yang berkompeten untuk membangun negeri tersebut. Adapun permasalahan lain adalah karena perekonomian masyarakat yang rendah sehingga mengakibatkan siswa putus sekolah, karena tidak mampu membayar iuran/pungutan oleh sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik, apa bila sekolah tersebut mempunyai fasilitas penunjang yang berkualitas baik. Tetapi nyatanya, banyak juga permasalahan menyangkut kondisi fasilitas sekolah yang masih buruk. Untuk

melakukan pembenahan/perbaikan diperlukan biaya/dana yang sangat besar. Karena adanya persoalan-persoalan ini maka pemerintah berupaya untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur masalah terkait dengan permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut.

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering dihadapi antara lain : Pertama, jumlah dan Besaran Dana, dimana jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah sering dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan operasional dan pendidikan, sehingga dapat menghambat pengembangan fasilitas, pembelian buku dan peralatan, serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, keterlambatan Pencairan Dana, keterlambatan dalam pencairan dana BOS dari pemerintah ke sekolah dapat mempengaruhi kemampuan sekolah dalam membiayai operasional dan kegiatan pendidikan. Ketiga, penggunaan dana tidak sesuai, penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat menghambat tujuan program BOS. Pengawasan yang tidak efektif juga dapat memungkinkan penyalahgunaan dana. Keempat, laporan penggunaan dana BOS, laporan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku dapat menghambat pencairan dana BOS triwulan berikutnya. Kelima, kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana BOS oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara (BPK), Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKP), Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Daerah dapat memungkinkan penyalahgunaan dana. Keenam, pengelolaan yang tidak transparan, pengelolaan dana BOS yang tidak transparan dapat menghambat ketercapaian tujuan program BOS dan meningkatkan kemungkinan

penyalahgunaan dana. Ketujuh, keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber daya seperti kurangnya staf dan fasilitas, dapat menghambat pengelolaan dana BOS secara efektif. Kedelapan, adanya perubahan kebijakan terkait BOS yang berubah-ubah atau kurang konsisten dari waktu ke waktu dapat menyulitkan sekolah dalam perencanaan dan penggunaan dana dengan efektif.

Masalah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sering terjadi karena beberapa factor/penyebab, diantaranya adalah : Pertama, ketidaktahuan sekolah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS dapat menyebabkan penyelewengan, sekolah yang tidak memahami prosedur pengelolaan dana BOS dapat melakukan pelaporan yang tidak sesuai dan tidak transparan. Kedua, keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan dana dan sarana, dapat menyebabkan penyelewengan dana BOS. Sekolah yang memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada dana yang tersedia dapat melakukan praktik-praktik ilegal untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, lemahnya pengawasan dari dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, dapat menyebabkan penyelewengan dana BOS. Pengawasan yang kurang efektif dapat memungkinkan oknum pengelola anggaran sekolah untuk melakukan penyelewengan. Keempat, pemahaman yang kurang tentang pengelolaan keuangan dapat menyebabkan penyelewengan. Sekolah yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan dapat melakukan pelaporan yang tidak sesuai dan tidak transparan. Kelima, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS dapat menyebabkan penyelewengan. Sekolah yang tidak mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS dapat memanfaatkan situasi ini untuk penyalahgunaan.

Keenam, membangun sistem pengawasan internal, sekolah perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. Ketujuh, pengembangan kapasitas pengelola guru dan tenaga kependidikan di sekolah harus diberdayakan melalui pelatihan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Kedelapan, proses pengawasan harus dilakukan secara berkala dan ketat pelaporan dan evaluasi yang transparan. Setiap bulan atau sesuai kebijakan, sekolah harus menyusun laporan tentang penerimaan dan pengeluaran dana BOS. Laporan ini harus disampaikan kepada pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan setempat.

Setiap pengelola BOS di sekolah sudah diberikan pedoman atau panduan tentang langkah-langkah penting dalam mengelola dana BOS di sekolah. Pengelolaan dana BOS wajib menerapkan fungsi manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi. Pengelolaan dana BOS yang efektif akan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di sekolah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para siswa. Dengan perencanaan yang baik, transparansi, dan pengawasan yang ketat, sekolah dapat memastikan bahwa dana BOS digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan proses belajar-mengajar dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pasalnya, dengan adanya dana BOS, sekolah negeri/swasta bisa berkembang dan mengelola pelaksanaan pendidikan dengan baik. Tahap awal dalam pengelolaan dana BOS adalah membuat perencanaan anggaran yang detail dan realistis, dalam proses perencanaan pengelolaan Dana BOS komponen yang terlibat di dalam pengelolaan dana BOS adalah Kepala Sekolah

sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, sebagian dewan guru, dan Komite Sekolah.

Berdasarkan uraian yang di jelaskan di atas, maka analisis pengelolaan dana BOS di rasa penting untuk di lakukan, namun masih banyak pihak sekolah yang belum melaksanakan analisis mengenai pelaksanaan dana BOS. Di daerah Kota Sorong SD YPPK Wilibrodus I merupakan sekolah swasta yang berada di Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong, Prov.Papua Barat Daya yang mana menjadi salah satu penerima program BOS dari pemerintah dan menerima penyaluran BOS per triwulan, maka SD YPPK Wilibrodus I harus melakukan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis yang sudah di tetapkan. Berdasarkan pentingnya analisis tersebut merupakan salah satu aspek yang berperan dalam tercapainya program dana BOS yang sesuai dengan aturan yang ada. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana yang di gunakan dan asal perolehan dana tersebut, serta penulis fokus pada sistem tata kelola oleh sekolah SD YPPK Willibrodus 1 Kota Sorong. Pengelolaan Dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang ada pada Petunjuk Teknis 2023. Dari hasil observasi dari penulis masih terdapat beberapa permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS meliputi RKAS yang tidak sesuai dengan penggunaan dana yang terjadi, dan tidak adanya publikasi hasil RKAS ke orang tua murid, dan pernah mengalami keterlambatan pencairan dana BOS pada tahap pertama ditahun 2023 dari pemerintah kepada sekolah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas terdapat berbagai permasalahan yang di temukan dalam pengelolaan dana BOS, hal tersebut menarik

minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Sorong” untuk mengetahui secara mendalam pengelolaan Dana BOS dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun 2023 yang di laksanakan oleh pihak pengelola BOS di SD YPPK Wilibrodus I.

1.2 Rumusan permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Sorong ?
2. Apa hambatan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Sorong ?
3. Apa solusi dalam mengatasi hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Sorong ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Soorong.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah/hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Sorong

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD YPPK Wilibrodus I Kota Sorong

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini cantara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi perbaikan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah Dasar (BOS SD), serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

b. Bagi Sekolah

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan dana BOS yang baik dan benar sehingga dana BOS yang di terima dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan dana BOS.

1.4.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan agar menghindari meluasnya permasalahan, maka penelitian ini di batasi. Fokus peneliti dalam penelitian ini hanya mencakup pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD YPPK Willibrobus 1 Kota Sorong tahun 2023 saja.

1.4.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan garis besar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi penjelasan teori yang di gunakan sebagai landasan utama dalam penelitian yang relevan dengan topik permasalahan, yaitu pengelolaan dana Bantuan operasional sekolah yang di mulai dari Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Serta berisi penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian (jenis penelitian, lokasi,subyek dan obyek,jenis data) metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB IV membahas mengenai analisis data yang telah di olah berdasarkan hasil wawancara dan dokumen laporan yang di berikan dan diakhiri dengan

pembahasan hasil dari penelitian yang telah di lakukan

BAB V

PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan masalah dalam penelitian dan saran.

